

Boskalis tidak harus memberikan dokumen tentang proyek mereka yang kontroversial; komunitas nelayan tidak akan mendapatkan informasi yang krusial

18 September – Hari ini pengadilan di Rotterdam mengeluarkan keputusan bahwa perusahaan pengerukan asal Belanda, Boskalis, tidak harus memberikan informasi mengenai risiko lingkungan dan sosial atas kegiatan penambangan tanah di kawasan pantai di dekat Makassar, Indonesia, kepada komunitas nelayan yang terdampak kegiatan tersebut. Organisasi lingkungan dan hak asasi manusia Both ENDS sebelumnya mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa Both ENDS tidak dapat diterima dan kasusnya dianggap tidak tepat untuk diajukan di Belanda. Both ENDS mengambil langkah hukum tersebut atas nama komunitas nelayan di Indonesia menyusul penolakan oleh Boskalis terhadap permintaan yang berkali-kali dilayangkan agar perusahaan tersebut memberikan informasi mengenai dampak dari kegiatan penambangannya.

Selama beberapa generasi, komunitas nelayan di Makassar hidup dari hasil yang diperoleh dari kawasan tangkap mereka. Kegiatan penambangan yang dilakukan Boskalis berdampak terhadap kawasan tangkap tersebut sehingga menyebabkan para keluarga nelayan di sana kehilangan mata pencaharian.

Pengadilan tidak yakin bahwa Both ENDS merupakan organisasi yang tepat dalam urusan perlindungan terhadap kepentingan para nelayan, terutama karena kasusnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi. “Both ENDS berfokus terutama pada hubungan antara lingkungan, hak asasi manusia, dan kemiskinan, muatan utama dalam pembangunan berkelanjutan,” kata Niels Hazekamp dari Both ENDS. “Organisasi ini sudah mengabdikan diri selama lebih dari tiga puluh tahun dalam hal perlindungan terhadap sumberdaya alam yang menjadi sandaran mata pencaharian secara langsung bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dan kami sudah bekerja dengan berbagai kelompok lokal selama empat tahun terakhir untuk membela kepentingan komunitas nelayan di sekitar Makassar dalam menghadapi dampak membahayakan dari proyek-proyek infrastruktur skala besar.”

Dalam keputusannya, pengadilan merujuk pada perubahan terbaru dalam perundang-undangan di Belanda yang memberlakukan aturan yang lebih ketat terhadap organisasi-organisasi yang membela kepentingan pihak lain, misalnya nelayan Indonesia. Keputusan itu berkesimpulan bahwa Both ENDS tidak memenuhi persyaratan yang semakin ketat tersebut. Selain itu, kasus ini juga tidak cukup tepat untuk dipertimbangkan di bawah hukum Belanda.

“Hal ini sangat mengkhawatirkan jika benar-benar merupakan pengaruh dari perubahan undang-undang,” kata pengacara hak asasi manusia Channa Samkalden, yang mendampingi Both ENDS dalam kasus ini. “Tujuan legislasi adalah untuk melawan klaim-klaim mencurigakan, bukan untuk membuat organisasi-organisasi nonpemerintah seperti Both ENDS semakin kesulitan untuk membela kepentingan para korban kekerasan hak asasi manusia di luar negeri.

Dialog dan langkah tindak lanjut

“Komunitas nelayan di Makassar dibiarkan dengan tangan hampa,” kata Hazekamp.
“Mereka membutuhkan informasi yang diminta agar mampu melindungi hak-hak mereka.
Keputusan ini sangat mengecewakan. Kami sekali lagi meminta supaya Boskalis mengadakan dialog dengan nelayan rakyat sebelum kegiatan penambanganselesai.”

Both ENDS sedang berembuk dengan para mitra di Indonesia dan nelayan rakyat mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil di Indonesia dan Belanda.